TESIS

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM UKGS DAN UKGM DI PUSKESMAS CIBOGO KABUPATEN SUBANG

Diajukan dalam Rangka Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan

NURUL IKHRIMAH
NIM 22.C2.0100

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2026

TESIS

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM UKGS DAN UKGM DI PUSKESMAS CIBOGO KABUPATEN SUBANG

Diajukan dalam Rangka Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan

NURUL IKHRIMAH
NIM 22.C2.0100

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2026

ABSTRAK

Hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian dari pemenuhan hak atas kesehatan yang memerlukan upaya promotif dan preventif melalui pelayanan kesehatan primer. Puskesmas memiliki peran strategis dalam upaya promotif dan preventif, termasuk melalui Program Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) dan Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat (UKGM). Permasalahan hukum dalam penelitian ini terletak pada apakah implementasi Program UKGS dan UKGM di Puskesmas Cibogo Kabupaten Subang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sejauh mana ketentuan hukum tersebut dapat diwujudkan dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaturan hukum program UKGS dan UKGM di Puskesmas Cibogo Kabupaten Subang dan menganalisis implementasi program UKGS dan UKGM di Puskesmas Cibogo Kabupaten Subang ditinjau dari aspek yuridis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber sesuai dengan topik penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Pengaturan hukum Program UKGS dan UKGM memiliki dasar yuridis yang jelas dan sesuai dengan kerangka hukum nasional. Namun, belum terdapat Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang secara khusus mengatur program kesehatan gigi dan mulut di Kabupaten Subang sehingga diperlukan penguatan regulasi di tingkat daerah. 2) Implementasi Program UKGS dan UKGM di Puskesmas Cibogo Kabupaten Subang secara yuridis telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui pelaksanaan upaya promotif dan preventif. Implementasi tersebut juga berkontribusi terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya SDG 3 (*Good Health and Well-Being*) melalui peningkatan upaya promotif dan preventif, deteksi dini, perluasan akses serta pemerataan pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Namun, implementasinya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, serta tindak lanjut terhadap sasaran yang memerlukan perawatan.

Kata kunci: UKGS, UKGM, Puskesmas, Tinjauan Yuridis

ABSTRACT

The right to health was a human right guaranteed under Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and reinforced by Law Number 17 of 2023 concerning Health. Oral and dental health was an integral part of the fulfillment of the right to health and required promotive and preventive efforts through primary health care. Puskesmas, played a strategic role in providing promotive and preventive services, including through the School Dental Health Program (UKGS) and Community Dental Health Program (UKGM). The legal issue in this study concerned whether the implementation of the UKGS and UKGM Programs at Puskesmas Cibogo, Subang Regency, complied with the applicable laws and regulations and to what extent the legal provisions implemented in oral and dental health services.

This study aimed to examine the legal regulations governing the UKGS and UKGM Programs at Puskesmas Cibogo, Subang Regency, and to examine their implementation from a juridical perspective. This study employed a socio-legal juridical method with a descriptive-analytical specification. Primary data were obtained through interviews with informants relevant to the research topic, while secondary data were obtained through a literature review of laws and regulations, books, journals, and related documents. The data were analyzed qualitatively.

The results showed that: 1) The legal framework for the UKGS and UKGM Programs had a clear juridical basis and was in accordance with the national legal framework. However, there were no Regional Regulations or Regent Regulations that specifically governed oral and dental health programs in Subang Regency, indicating the need for stronger regulations at the regional level. 2) The implementation of the UKGS and UKGM Programs at Puskesmas Cibogo, Subang Regency, was juridically in accordance with the applicable regulations through promotive and preventive efforts. The implementation also contributed to the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly SDG 3 (Good Health and Well-Being), through the improvement of promotive and preventive efforts, early detection, expanded access to, and equitable provision of oral and dental health services. However, the implementation was not yet fully optimal due to limitations in health personnel, facilities and infrastructure, and follow-up services for target groups requiring further treatment.

Keywords: *UKGS, UKGM, Puskesmas, Juridical Review*